

Pengaruh Xenophobia Terhadap Kebijakan Penolakan Pengungsi oleh Pemerintah
Hongaria

Elitasari Apriyani

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Over one million refugees who are dominated by Middle East people across Europe in 2015. Hungary as member of European Union and state parties of Refugee Convention 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 (New York Protocol) rejects refugees. The research question of this study is why Hungary rejects refugees. This study aims to explain in the constructivist approach of the reasons Hungary rejects the Middle East refugees. The technique of analysis of this study uses qualitative analysis. The data in this study is secondary data obtain from books, websites, and other sources. Hungary and Middle East have different values and norms which are constructed by its society. These differences lead xenophobia action of Hungary to Middle East refugees.

Keywords: Hungary, Refugee, Xenophobia, Eurosceptism

PENDAHULUAN

PBB menginisiasi *Refugee Convention* tahun 1951 yang mengatur mengenai pengungsi. Konvensi ini juga mencetuskan pendirian UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), yaitu badan PBB yang menangani pengungsi. Menurut konvensi tersebut, pengungsi adalah orang yang tidak mampu atau tidak bisa untuk kembali ke negara asalnya karena adanya ancaman keselamatan jika kembali. Konvensi ini juga berisi hak-hak yang harus dipenuhi negara dalam menangani pengungsi. Isu pengungsi berkembang, maka PBB mengatur lebih dalam mengenai pengungsi pada *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 (New York Protocol)*.

Hongaria menjadi *states parties* dari *Refugee Convention 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 (New York Protocol)*. Hongaria mengimplementasikan *Refugee Convention 1951* dan *New York Protocol* dalam *Act LXXX of 2007 on Asylum*. Sehingga, Hongaria mendukung hak-hak dan perlindungan pengungsi. Hongaria sendiri merupakan pusat UNHCR untuk wilayah Eropa Tengah.

Hongaria juga tergabung dalam organisasi regional, Uni Eropa tahun 2004. Uni Eropa memiliki prinsip kebebasan, solidaritas, demokrasi, kesetaraan, martabat manusia, serta hak asasi manusia sebagai basisnya. Uni Eropa juga meratifikasi *Refugee Convention 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 (New York Protocol)*. Sehingga, Uni Eropa merupakan institusi yang melindungi dan mendukung hak-hak pengungsi.

Fenomena *Arab Spring* tahun 2011 di Timur Tengah menjadi pemicu berbagai pergolakan di Timur Tengah. Pergolakan internal negara-negara Arab mendorong ketidakstabilan negara dan berujung perang di beberapa negara. Perang merupakan mimpi buruk bagi masyarakat Arab yang menguras kerugian harta dan jiwa. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk mengungsi mencari suaka ke wilayah yang lebih aman.

Eropa, Hongaria salah satunya, menjadi salah satu tujuan dari pengungsi Timur Tengah. Hal ini berkaitan dengan Eropa yang dinilai mampu memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Eropa juga memiliki wilayah relatif aman serta akses ke Eropa yang lebih menjanjikan dan dekat.

Data dari UN Refugee Agency menyebutkan bahwa pada tahun 2016 pengungsi dan migran yang datang ke Eropa melalui laut Mediterania lebih dari 300.000 jiwa (Clayton, Over 300.000 refugees and migrants cross Med so far in 2016, 2016). Tahun sebelumnya, 2015, pengungsi dan migran yang datang ke Eropa mencapai lebih dari 1 juta jiwa melalui laut, sedangkan lebih dari 34.900 melalui darat (Clayton & Holland, Over one million sea arrivals reach Europe in 2015, 2015). Hal ini cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 dimana para pengungsi dan migran yang datang sekitar 280.000 melewati jalur darat maupun laut (BBC, Migrant Crisis: Migration to Europe Explained in seven charts, 2016). Sehingga, ini menjadi masalah baru bagi Eropa, terutama Uni Eropa.

Hongaria menjadi pintu utama pengungsi yang ingin ke negara Uni Eropa melalui jalur timur. Hal ini sebagai konsekuensi dari Regulasi Dublin yang menjadikan negara pertama yang didatangi pengungsi yang bertanggung jawab dalam menyeleksi pengungsi.

Sesuai dengan CEAS (Common European Asylum System) dari Uni Eropa, maka pencari perlindungan internasional akan diseleksi guna mendapatkan status sebagai pengungsi maupun *subsidiary protection*. Mereka yang mendapatkan status tersebut akan mendapatkan kebutuhan dasar yang diberikan oleh negara penerima. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara penerima seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Pengungsi yang datang ke Hongaria didominasi oleh tiga negara Timur Tengah, yaitu Suriah, Irak, dan Afganistan. Pengungsi mencari perlindungan internasional dengan mengajukan suaka karena negara asalnya tidak mampu atau enggan memberikan perlindungan. Perang yang berkepanjangan di Suriah, Irak, dan Afganistan yang juga mendorong warga sipil negara tersebut mencari perlindungan internasional.

Data Eurostat menyebutkan bahwa terdapat 111.760 pengajuan suaka yang berasal dari Suriah, 29.250 pengajuan suaka yang berasal dari Irak, serta 27.300 pengajuan suaka yang berasal dari Afganistan pada kuartal ketiga tahun 2016 (Eurostat, 2016).

Uni Eropa merespon krisis pengungsi tersebut dengan mengeluarkan regulasi baru. Uni Eropa mengeluarkan Council Decision (EU) 2015/1523 (European Council, 2015). Isi dari keputusan itu adalah membagi beban pengungsi secara merata ke seluruh negara di Uni Eropa sesuai dengan kondisi kemakmuran dan ekonomi setiap negara. Hongaria, sebagai anggota Uni Eropa pada kenyataannya menolak proposal dari Uni Eropa yang mana membagi kuota setiap negara untuk menerima pengungsi Timur Tengah yang masuk ke Uni Eropa.

Hongaria sebelumnya meratifikasi *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*). Namun, saat krisis pengungsi Eropa 2015, Hongaria menolak menerima pengungsi. Untuk itu, penulis akan menjelaskan alasan dari penolakan Hongaria pada pengungsi Timur Tengah.

STUDI PUSTAKA

Konstruktivisme merupakan teori yang hadir pasca Perang Dingin runtuh. Hal ini dikarenakan teori – teori sebelumnya hanya terpaku pada materialisme dan rasionalisme. Materialisme menolak tentang adanya ide, norma, dan nilai, serta rasionalisme tidak mengakui bahwa aspek sosial merupakan salah satu strategi dan menolak identitas.

constructivists argue that systems of shared ideas, beliefs and values also have structural characteristics, and that they exert a powerful influence on social and political action. (Reus-Smit, 2005).

Konstruktivis mengungkapkan bahwa struktur sosial yang membentuk perilaku sosial dan politik aktor, baik itu individu maupun negara. Konstruktivis menekankan bahwa norma dan ide sama pentingnya dengan struktur material. Hal ini karena struktur sosial, termasuk nilai, norma, dan identitas, membentuk aksi yang dilakukan aktor.

Struktur normatif dan ide membentuk identitas dan kepentingan aktor dengan tiga mekanisme: *imagination, communication, constraint*. *Imagination* merupakan keadaan bagaimana aktor bersikap, apa saja batasan – batasan dalam bersikap, serta strategi yang aktor bayangkan. Sedangkan *communication* merupakan bagaimana aktor membenarkan perbuatan yang dia buat. Hal ini dapat dengan membuat aturan yang melegitimasi perbuatannya. Lalu,

constraint adalah pemaksaan dimana perbuatan aktor memiliki paksaan moral untuk sesuai dengan konteks sosial.

Ted Hoft dan Peter J. Katzenstein menekankan bahwa perilaku negara terkonstruksi dalam nilai dan norma domestik negara. Negara dipandang sebagai aktor sosial yang memiliki identitas (Katzenstein, 1996). Identitas suatu negara dalam politik dunia adalah sedikit banyaknya merupakan kebiasaan sosial yang merupakan identitas dalam rumah (Hofp, 1998). Identitas tersebut terkonstruksikan dari nilai – nilai yang dianggap benar di dalam negara tersebut. Internalisasi nilai dan norma oleh aktor memberikan standar kebenaran dari segala aspek dalam hidup, seperti ekonomi, politik, aktivitas budaya. Lalu, dari interaksi – interaksi sosial tersebut akan menjadi struktur sosial. Maka, konstruktivis mampu menjelaskan bagaimana perkembangan dari norma dan identitas tersebut dalam fenomena politik internasional.

PEMBAHASAN

Penolakan Hongaria Terhadap Pengungsi Timur Tengah

Sekitar 400.000 pengungsi datang ke Hongaria tahun 2015, sehingga ini mendorong Hongaria untuk menutup area perbatasannya. 99% gelombang pengungsi yang datang ke Hongaria melalui jalur selatan, yaitu perbatasan Hongaria-Serbia (Pollet & Mouzourakis, 2015). Pagar pembatas Hongaria-Serbia selesai dibangun pada September 2015. Pagar pembatas ini setinggi 4 meter dan sepanjang 110 mil (175 km) (Dunai, 2015). Hongaria juga membangun pagar pembatas yang sama di perbatasan Hongaria-Kroasia. Pagar pembatas sepanjang 216 mil (348 km) ini selesai dibangun pada Oktober 2015 (Lyman, 2015).

Selain itu, Hongaria juga tidak segan menghukum para pengungsi yang nekat masuk ke Hongaria secara illegal dengan mengamandemen *Criminal Code and the Act on Criminal Procedure Act CXL*. Hukuman terhadap pengungsi ini mulai dari 3 tahun hingga 20 tahun penjara disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan pengungsi. 256 pengungsi dinyatakan melanggar hukum *Criminal Code and the Act on Criminal Procedure Act CXL* periode 15 hingga 29 September 2015 (Pollet & Mouzourakis,

2015). Polisi bahkan tidak segan – segan menggunakan kekerasan jika pengungsi tidak patuh.

Hongaria juga menolak Council Decision (EU) 2015/1523, yaitu solusi dari Uni Eropa atas krisis pengungsi di Eropa. Council Decision (EU) 2015/1523 berisi rencana pengalihan penerima status pengungsi dan *subsidiary protection* ke masing-masing negara anggota Uni Eropa. Pengalihannya menyesuaikan dengan jumlah penduduk negara, keadaan ekonomi negara, hingga angka pengangguran negara. Uni Eropa menjatah 1.924 orang yang akan dialihkan ke Hongaria dari 120.000 penerima suaka. Namun, Hongaria menolak proposal Uni Eropa tersebut.

Hongaria juga menekan Uni Eropa dengan memperkuat posisi penolakannya dengan negara-negara *Visegrad countries* (Republik Ceko, Hongaria, Polandia, Slovakia). *Visegrad countries* mengungkapkan pada *joint statement* di Bratislava pada 23 Juni 2015 bahwa pembagian kuota pengungsi merupakan keputusan yang tidak dapat diterima (Virostkova, 2015). Hongaria bahkan mengancam Uni Eropa bahwa Hongaria akan menangguk regulasi Dublin dimana negara pertama yang didatangi pencari suaka yang melakukan proses penyeleksian suaka.

Hongaria semakin memperkuat posisi penolakan terhadap pengungsi dengan referendum. Referendum dilaksanakan pada 2 Oktober 2016 jam 04.00 GMT hingga pukul 17.00 GMT (Al Jazeera, 2016). Pertanyaan dari referendum ini adalah “*Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?*” yang artinya "Apakah Anda menghendaki mandat Uni Eropa untuk memberikan kewajiban Hongaria menampung bukan warga negara Hongaria, walaupun tanpa persetujuan parlemen?". Masyarakat Hongaria hanya perlu menjawab iya atau tidak dalam referendum ini.

Hasil dari referendum adalah 92% masyarakat Hongaria yang ikut referendum menyatakan penolakan akan pembagian kuota pengungsi dari Uni Eropa. 8% dari masyarakat Hongaria yang ikut referendum menyatakan setuju akan pembagian kuota pengungsi dari Uni Eropa (Prifti & Hutcherson, 2016). Namun, sayangnya hanya 43.7% masyarakat Hongaria yang berpartisipasi dalam referendum ini (Prifti &

Hutcherson, 2016). Sehingga, referendum ini belum bisa dikatakan terlegitimasi di mata dunia karena kurang dari 50% masyarakatnya ikut berpartisipasi.

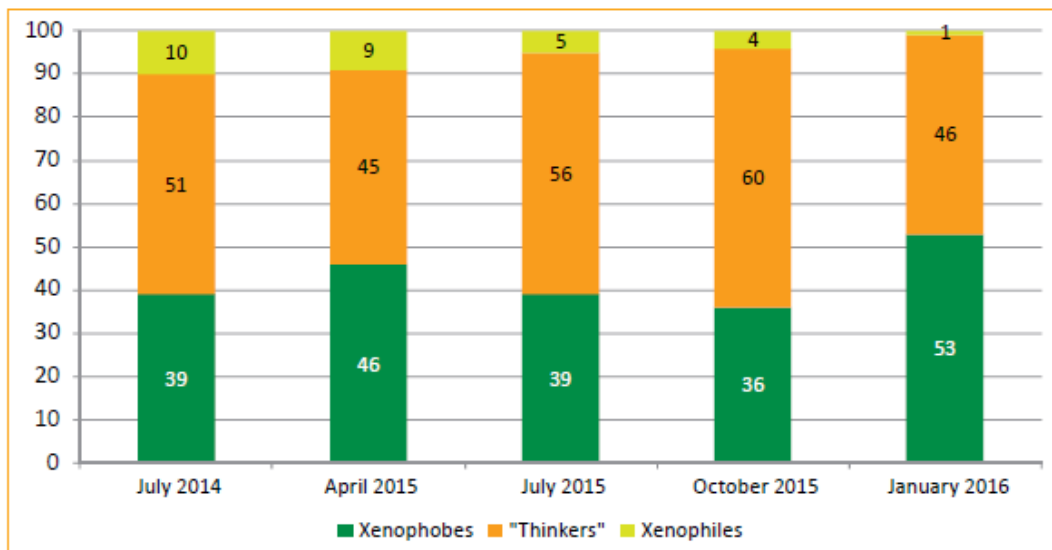
Xenophobia Masyarakat Hongaria

Masyarakat Hongaria sendiri merupakan masyarakat yang homogen yang didominasi oleh etnis Hongaria. Ini dibuktikan dengan data tahun 2016 yang menyebutkan bahwa etnis Hongaria mencapai 85.6% dari jumlah seluruh penduduk Hongaria (Index Mundi, 2016). Sehingga, masyarakat Hongaria cenderung mengikuti nilai dan norma yang berasal dari etnis Hongaria.

Tárki, badan riset independen di Hongaria melakukan riset tentang tanggapan masyarakat terhadap pengungsi yang datang ke Hongaria. Riset ini dirilis dengan judul “The Social Aspects of the 2015 Migration Crisis in Hungary”.

Xenophobia merupakan prasangka buruk yang kuat terhadap orang asing, xenophilia merupakan ketertarikan terhadap orang asing, sedangkan thinkers yang belum memutuskan apakah pro ataupun kontra terhadap orang asing. Ketiga kategori tersebut dapat menunjukkan bagaimana respon masyarakat Hongaria terhadap pengungsi.

Pengungsi merupakan orang asing yang datang ke Hongaria, terlebih pengungsi didominasi datang dari Timur Tengah. Sehingga, parameter xenophobia, xenophilia, dan thinker akan mampu menjadi parameter prasangka masyarakat Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah.



Source: TÁRKI Omnibus 2014–2016.

Grafik 1.1 Tingkat Xenophobia di Hongaria

(Sik, 2016)

Data di atas dimulai sejak tahun 2014 dimana Hongaria mulai menunjukkan kebijakan anti pengungsi. Hal ini juga diikuti dengan krisis pengungsi yang semakin memuncak pada tahun 2015, hingga tahun 2016 dimana krisis pengungsi masih terjadi.

Berdasarkan data di atas, masyarakat Hongaria cenderung tidak tertarik dengan orang asing, dengan proporsi tertarik dengan orang asing tidak lebih dari 10%. Sedangkan xenophobia cenderung naik-turun dari Juli 2014 hingga Januari 2016 yang puncaknya pada Januari 2016 dengan 53% masyarakat Hongaria mengaku xenophobia. Thinkers juga proporsinya naik-turun yang mengalami puncaknya dengan 60% pada Oktober 2016 (Sik, 2016).

Xenophobia sangat terkait dengan perasaan terancam akan datangnya orang asing. Umumnya manusia tidak akan memberikan toleransi terhadap kelompok luar yang memberikan ancaman terhadap kelompoknya. Sehingga, penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah didasarkan oleh adanya prasangka buruk yang kuat dari masyarakatnya serta adanya ancaman terhadap orang asing.

Sebuah prasangka buruk terhadap orang asing tersebut terkonstruksikan dari nilai dan norma Hongaria. Prasangka buruk membuktikan adanya suatu pertentangan antara

nilai dan norma Hongaria dengan pengungsi yang didominasi berasal dari Timur Tengah. Terlebih lagi, masyarakat Hongaria merupakan masyarakat yang homogen yang terbiasa hidup dengan kesamaan kultur Hongaria. Sehingga, data tersebut membuktikan adanya ketakutan warga Hongaria terhadap orang asing.

Soft-Euroceptism Hongaria Terhadap Uni Eropa

Euroceptism adalah suatu pandangan akan anti Uni Eropa karena Uni Eropa melemahkan kedaulatan negara. Skeptis ini berasal dari ketakutan akan budaya Hongaria dan otonomi Hongaria yang terlalu diatur oleh instusi supranasional Uni Eropa. Hongaria beranggapan bahwa semakin lama Uni Eropa semakin kuat mengatur negara-negara anggotanya, sehingga ini terlihat sebagai bentuk perang dengan Hongaria (Bebel & Collier, 2015).

Hongaria termasuk *soft Euroceptic*, yaitu pada dasarnya tidak menolak integrasi Eropa, terutama bidang ekonomi. Namun, ada beberapa batasan yang seharusnya Uni Eropa tidak langkahi sebagai organisasi regional. Bagi Hongaria, Uni Eropa merupakan badan yang dibentuk untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggotanya, bukan mengutak-atik, bahkan intervensi terhadap negara-negara anggotanya.

Hongaria berpendapat bahwa negara merupakan institusi dengan otoritas tertinggi di wilayah kekuasaannya. Hongaria juga beranggapan bahwa kepentingan nasional Hongaria tetap harus diprioritaskan dan dilindungi. Ketika kebijakan Uni Eropa bertentangan dengan kepentingan nasional Hongaria, maka Hongaria akan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepetingan nasionalnya. Sehingga, Hongaria sangat defensif ketika Uni Eropa mulai intervensi dalam kebijakan Hongaria yang dinilai tidak sesuai dengan Hongaria.

Sikap *soft Euroceptism* tersebut terlihat pada sikap Hongaria yang menolak keras kebijakan Uni Eropa pada pembagian kuota pengungsi. Victor Orbán, Perdana Menteri Hongaria, merespon bahwa gelombang besar migrasi ini hanya akan membawa luka dan ancama pada orang – orang Eropa, maka ini harus dihentikan (Lyman, 2015). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Péter Szijjártó, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan, bahwa rencana pembagian kuota pengungsi tidak realistis (The Telegraph, 2015).

Perbedaan Nilai dan Norma yang Dianut Hongaria dan Pengungsi Timur Tengah

Ted Hoft menyebutkan bahwa identitas suatu negara dalam politik dunia adalah sedikit banyaknya merupakan kebiasaan sosial yang merupakan identitas dari dalam rumah (Hofp, 1998). Identitas tersebut terbentuk dari nilai dan norma yang terkonstruksi di dalam negaranya. Hongaria memiliki nilai dan norma yang telah mengakar sejak lama, begitupula dengan masyarakat Timur Tengah yang juga memiliki nilai dan norma yang sangat mereka percayai.

Perbedaan pertama, pengungsi Timur Tengah sangat menjunjung nilai kehormatan, seperti aturan berpakaian serta batasan pergaulan bagi pria dan wanita. Sedangkan, masyarakat Hongaria tidak memiliki kepercayaan akan aturan berpakaian. Masyarakat Hongaria memiliki kebebasan atas pakaian apa yang akan mereka gunakan.

Perbedaan kedua, pergaulan antara pria dan wanita dalam masyarakat Hongaria juga aturannya tidak sebegitu ketat seperti budaya di Arab. Budaya mencium tangan wanita oleh pria di Hongaria dianggap sebagai bentuk penghormatan pria atas wanita, sedangkan mencium tangan wanita oleh pria di Arab dilarang jika bukan muhrim (suami atau keluarga milik wanita).

Bahkan, nilai kebebasan sangat dinikmati di Hongaria yang merupakan salah satu nilai yang dihargai di Hongaria. Kebebasan dalam menjunjung hak asasi manusia selama tidak bersinggungan dengan hak asasi orang lain serta perlindungan hak asasi manusia. Berbeda dengan nilai, norma, serta budaya di Timur Tengah yang membatasi kebebasan seseorang.

Perbedaan ketiga, budaya patriarki Arab cukup kuat dengan membatasi hak-hak wanita. Sedangkan, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya *ladies first* Hongaria yang sangat mengapresiasi wanita. Apalagi budaya pernikahan anak Arab yang kurang bisa diterima oleh nilai dan norma Hongaria. Hal ini berkaitan dengan menikah di usia anak-anak yang merenggut hak anak itu sendiri.

Perbedaan nilai dan norma yang dianut inilah yang memunculkan xenophobia atau ketakutan terhadap pengungsi. Ketakutan ini mengakar dari adanya prasangka buruk terhadap pengungsi bahwa mereka adalah sebuah ancaman.

Sebuah prasangka buruk terhadap orang asing tersebut terkonstruksikan dari nilai dan norma Hongaria. Prasangka buruk membuktikan adanya suatu pertentangan antara nilai dan norma Hongaria dengan pengungsi yang didominasi berasal dari Timur Tengah. Terlebih lagi, masyarakat Hongaria merupakan masyarakat yang homogen dengan proporsi etnis Hongaria mencapai 85.6% dari jumlah seluruh penduduk Hongaria (Index Mundi, 2016). Masyarakat Hongaria yang homogen tersebut terbiasa hidup dengan kesamaan kultur Hongaria. Sehingga, data tersebut membuktikan adanya ketakutan warga Hongaria terhadap orang asing.

Hongaria berkomitmen akan melindungi budaya Hongaria. Hal tersebut tertulis dalam pembukaan konstitusi dasar Hongaria:

“We commit to promoting and safeguarding our heritage, our unique language, Hungarian culture, the languages and cultures of nationalities living in Hungary, along with all man-made and natural assets of the Carpathian Basin. We bear responsibility for our descendants; therefore we shall protect the living conditions of future generations by making prudent use of our material, intellectual and natural resources.”

(Hungarian Government, 2013)

Budaya Hongaria juga mengakar dari nilai dan norma Kristen. Hal ini berkaitan dengan budaya Hongaria yang merupakan aset dari kerajaan Kristen Katolik Hongaria pada masa lalu. Walaupun Hongaria tidak pernah menyatakan Hongaria adalah negara Kristen, namun Hongaria sangatlah bangga dengan histori negara Kristen Katolik yang dulu pernah terbentuk di Hongaria tahun 1000. Kebanggaan akan hal tersebut sangatlah jelas tertulis pada pembuka konstitusi dasar Hongaria :

“We are proud that our king Saint Stephen built the Hungarian State on solid ground and made our country a part of Christian Europe one thousand years ago.”

“We recognise the role of Christianity in preserving nationhood. We value the various religious traditions of our country.”

(Hungarian Government, 2013)

Maka, Hongaria sangat bangga akan nilai Kristen yang menyatukan negara Hongaria. Kebanggaan akan Kristen tersebut dinilai penting, sehingga haruslah dijaga. Nilai dan norma Kristen tersebut menjadi kewajiban bagi Hongaria untuk melindunginya dari nilai dan norma asing yang mencoba masuk. Hal ini berkaitan akan adanya ancaman nilai dan norma lain yang datang yang akan merubah nilai dan norma Kristen yang sangat berarti bagi Hongaria.

Viktor Orbán menyebutkan bahwa Eropa dan budaya Eropa memiliki akar Kristen. Sedangkan pengungsi mayoritas berasal dari Timur Tengah yang memiliki akar Islam mengancam identitas Eropa (Noack, 2015). Sehingga, perlu tindakan untuk membendung gelombang pengungsi Timur Tengah yang datang ke Eropa untuk melindungi identitas Eropa.

Masyarakat Hongaria memiliki karakter berjuang sampai mati terhadap apa yang diyakininya (Trócsónyi, 1939).. Maka, masyarakat Hongaria akan melindungi dan memperjuangkan keyakinan dan kebanggaan nilai dan norma Kristen tersebut dengan cara apapun. Hal ini diimplementasikan dengan penolakan keras Hongaria atas pengungsi Timur Tengah. Hongaria bahkan juga menolak proposal Uni Eropa dalam pembagian kuota penerimaan suaka yang tertulis pada Council Decision (EU) 2015/1523.

Demi menguatkan pernyataan penolakan pembagian kuota penerimaan suaka, Hongaria mengadakan referendum apakah menerima atau menolak pembagian penerimaan suaka Uni Eropa pada 2 Oktober 2016. Walaupun hanya 43.7% masyarakat Hongaria yang ikut referendum, 92% masyarakat Hongaria yang ikut referendum menyatakan penolakan terhadap kuota pengungsi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Hongaria banyak juga yang menolak pengungsi Timur Tengah.

Hongaria juga memiliki sikap *soft-Eurosceptic* terhadap Uni Eropa, yaitu adanya skeptis terhadap Uni Eropa. Skeptis Hongaria terhadap Uni Eropa adalah ketika kebijakan Uni Eropa bertentangan dengan kepentingan nasional Hongaria. Bagi Hongaria, Uni Eropa seharusnya memiliki beberapa batasan yang seharusnya tidak Uni Eropa langkahi sebagai organisasi regional.

Sebelumnya, saat perang Yugoslavia 1991-1995, Hongaria menerima pengungsi perang tersebut dengan tangan terbuka. Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan nilai dan norma kekristenan serta budaya Eropa yang sama-sama dianut oleh Hongaria dan pengungsi perang Yugoslavia. Kebijakan pemerintah Hongaria terhadap pengungsi perang Yugoslavia juga dapat dibilang istimewa.

Hongaria memberikan opsi kewarganegaraan bagi pengungsi perang Yugoslavia yang mengungsi setelah tinggal secara legal minimal 3 tahun di Hongaria. Padahal, negara lain rata-rata memberikan kewarganegaraan terhadap pengungsi setelah tinggal secara legal 8 tahun di negaranya. Faktanya dua per tiga dari 6500 pengungsi Yugoslavia yang diakui oleh Hongaria mendapatkan kewarganegaraan Hongaria (Klenner & Szép, 2010).

Selain itu, pengungsi memiliki hak dan kewajiban yang hampir sama dengan masyarakat Hongaria. Para pengungsi tidak perlu izin atau menggunakan registrasi khusus untuk bekerja, mereka juga dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah Hongaria. Hal yang membedakan dengan masyarakat Hongaria adalah pengungsi Yugoslavia tidak memiliki hak pilih politik di Hongaria, menjadi pegawai negeri, memiliki kantor, serta hal-hal lain yang mengharuskan warga negara Hongaria sebagai syarat hukum (Klenner & Szép, 2010).

Yugoslavia sendiri memiliki penduduk yang mayoritas beragama Kristen. Sehingga, masyarakat Yugoslavia mengamalkan nilai dan norma Kristen sebagai jalan hidup sehari-hari. Seperti yang telah diketahui bahwa Hongaria merupakan negara yang mengapresiasi nilai dan norma Kristen. Adanya persamaan nilai dan norma Kristen tersebut yang mendorong masyarakat Hongaria untuk menerima pengungsi perang Yugoslavia.

Selain itu, dari segi historis, beberapa wilayah Yugoslavia, yaitu yang sekarang merupakan negara Slovenia dan Kroasia sempat pernah di bawah pengaruh Kerajaan Hongaria di masa lalu. Sehingga, dulu masyarakat wilayah tersebut juga pernah berjuang dalam mempertahankan Kristen barat dari pengaruh Ottoman Turki. Hal ini menjadikan adanya ikatan budaya juga yang mirip.

Yugoslavia juga merupakan bagian dari peradaban Eropa. Maka, budaya Yugoslavia juga merupakan perpanjangan tangan dari budaya Eropa, seperti budaya mengapresiasi wanita. Hal ini yang semakin memperkuat keputusan Hongaria untuk menerima pengungsi perang Yugoslavia.

Hal ini cukup berbeda dengan kasus etnis Roma (Gypsy) DI Hongaria. Ini berkaitan dengan integrasi etnis Gypsy di Hongaria yang masih belum berhasil. Padahal, etnis Gypsy sudah mulai berdatangan sejak abad ke-14 dan abad ke-15 di Hongaria.

Etnis Gypsy merupakan etnis minoritas terbesar di Hongaria. Etnis Gypsy yang hidup di Hongaria sekitar 316 ribu jiwa atau sekitar 3.2% dari total penduduk Hongaria (Index Mundi, 2016).

Etnis Gypsy berasal dari daerah India. Ini dibuktikan dengan bahasa Romani, yaitu bahasa sehari-hari etnis Gypsy yang mirip dengan bahasa India. Etnis Gypsy memiliki budaya yang mengakar dari budaya Hindu yang dimodifikasikan dengan agama yang dianut etnis Gypsy. Misalnya budaya Sakta yang berasal dari agama Hindu. Budaya ini melakukan pemujaan terhadap Sakta, yaitu Ibu Dewi umat Hindu. Namun, untuk etnis Gypsy yang bergama Kristen, memodifikasi ajaran ini dengan pemujaan terhadap Bunda Maria. Masyarakat Hongaria memiliki prasangka yang buruk terhadap etnis Gypsy. Hal ini berkaitan dengan etnis Gypsy yang menganggap dirinya berbeda dengan masyarakat Hongaria lainnya. Etnis Gypsy memiliki panutan hidup sendiri yang mengakar dari ajaran Hindu dan tidak menerima nilai dan norma Hongaria.

Bagi pandangan etnis Gypsy, pendidikan bukanlah hal utama yang diprioritaskan. Hal ini dibuktikan dengan angka putus sekolah anak-anak etnis Gypsy juga tinggi. Banyak dari mereka yang hanya menyelesaikan sekolah dasar. Bahkan, data dari pemerintah Hongaria tahun 2004 hanya sekitar 0.3% etnis Gypsy yang menyelesaikan pendidikan hingga bangku kuliah (Hungary, 2004). Oleh sebab itu, kesempatan kerja bagi etnis Gypsy juga terbatas. Maka, pengangguran dan kemiskinan etnis Gypsy juga cukup tinggi. Sehingga, etnis Gypsy dikenal sebagai etnis yang kurang mumpuni dari segi ekonomi di Hongaria. Disamping itu, etnis Gypsy juga mendapatkan persepsi tidak berpendidikan karena hanya sedikit dari mereka yang menyelesaikan pendidikan hingga

perguruan tinggi. Padahal, pemerintah Hongaria telah memberikan subsidi pendidikan untuk etnis Gypsy, namun masih belum berhasil.

Etnis Gypsy tinggal di daerah dimana hanya kelompoknyalah yang tinggal. Sehingga, ini membatasi interaksi dengan etnis Hongaria maupun etnis lainnya di Hongaria. Hal ini yang mendorong segregasi etnis Gypsy di Hongaria.

Walaupun Hongaria mengakui adanya etnis Gypsy di Hongaria, namun Hongaria terus mendorong setiap etnis minoritas, terutama Gypsy untuk menerima nilai dan norma Hongaria. Namun, etnis Gypsy bersikukuh untuk hidup dengan cara mereka sendiri dengan nilai dan norma yang mengakar dari ajaran Hindu yang mereka percayai. Sikap inilah yang menghambat integrasi etnis Gypsy di Hongaria.

Sikap menjaga nilai dan norma Kristen dan budaya Eropa menjadi hal yang penting bagi Hongaria untuk menjaganya. Hal ini terlihat dari bagaimana Hongaria bersikap menerima tangan terbuka pada pengungsi korban perang Yugoslavia dan etnis Gypsy yang masih menjadi masalah karena tidak ingin terintegrasi dengan Hongaria.

Berdasarkan pernyataan Ted Hoft tentang sikap dalam politik dunia adalah kebiasaan yang merupakan identitas di dalam rumah, maka penolakan berasal dari dalam Hongaria. Penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah berdasarkan nilai dan norma pengungsi Timur Tengah yang tidak dapat diterima oleh nilai dan norma Hongaria. Hongaria sangat bangga akan nilai dan norma Kristen yang menyatukan negara Hongaria, maka Hongaria melindunginya dengan cara apapun. Hal ini terlebih masyarakat Hongaria yang memiliki karakter untuk berjuang habis-habisan akan keyakinan yang dimilikinya.

KESIMPULAN

Pergolakan internal negara-negara Arab sebagai akibat dari *Arab Spring* tahun 2011 mendorong ketidakstabilan negara dan berujung perang di beberapa negara. Perang banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun immaterial. Hal ini yang kemudian mendorong masyarakat Timur Tengah untuk mengungsi mencari suaka ke wilayah yang lebih aman.

Eropa merupakan wilayah yang aman serta akses ke Eropa lebih menjanjikan dan dekat. Sehingga, ini mendorong pengungsi untuk datang ke Eropa. Puncak dari krisis pengungsi ini adalah tahun 2015 dimana lebih dari 1 juta pengungsi yang datang ke Eropa. Banyaknya pengungsi yang datang menimbulkan masalah baru bagi Eropa, terutama Uni Eropa.

Hongaria juga merupakan pintu timur untuk masuk ke Uni Eropa. Sebagai konsekuensi dari regulasi Dublin, maka Hongaria bertanggung jawab akan penyeleksian aplikasi para pengungsi. Tiga negara yang mendominasi pengungsi di Hongaria adalah Suriah, Irak, serta Afganistan. Hongaria sebagai *state parties* dalam *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*) seharusnya menerima pengungsi, namun Hongaria menolak pengungsi dalam kasus krisis pengungsi Eropa tahun 2015.

Pengungsi Timur Tengah memiliki nilai, norma, serta budaya Islam dan Arab yang sangat dominan. Nilai dan norma yang dijunjung adalah nilai-nilai Islam, seperti kesetiaan, kehormatan, hak asasi manusia yang dibatasi, serta budaya patriarki. Sedangkan masyarakat Hongaria memiliki nilai, norma, budaya Kristen dan Eropa yang sangat mengakar kuat. Nilai dan norma yang dijunjung masyarakat Hongaria adalah nilai-nilai Kristen seperti apresiasi terhadap wanita serta kebebasan yang universal. Perbedaan tersebutlah yang tidak dapat diterima oleh Hongaria.

Hongaria sangat bangga akan nilai Kristen yang mempersatukan negara Hongaria. Sebelumnya, Hongaria pernah mendeklarasikan sebagai kerajaan Kristen Katolik tahun 1000. Kebanggaan akan Kristen tersebut dinilai penting bagi Hongaria, sehingga timbul kewajiban untuk menjaganya dari nilai dan norma asing. Hal ini berkaitan akan adanya ancaman nilai dan norma lain yang datang yang akan merubah nilai dan norma Kristen yang sangat berarti bagi Hongaria.

Nilai dan norma Hongaria merupakan hal yang penting bagi Hongaria terbukti dengan usaha keras pemerintah Hongaria untuk mengintegrasikan etnis Gypsy di Hongaria. Selain itu, persamaan nilai dan norma Hongaria yang mendorong penerimaan korban pengungsi perang Yugoslavia dengan tangan terbuka.

Adanya suatu nilai yang tertanam kuat untuk melindungi nilai dan norma Kristen serta budaya Hongaria menjadikan masyarakat memiliki prasangka buruk atau xenophobia terhadap pengungsi Timur Tengah. Masyarakat Hongaria merasa bahwa pengungsi Timur Tengah yang datang merupakan ancaman akan nilai, norma, serta budaya Hongaria.

Perpanjangan tangan dari sikap xenophobia tersebut adalah dengan kebijakan luar negeri Hongaria yang menolak pengungsi Timur Tengah. Hal ini berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang merupakan refleksi dari nilai dan norma dalam negara Hongaria. Sehingga, alasan kebijakan pemerintah yang menolak pengungsi Timur Tengah adalah adanya perasaan terancam akan nilai dan norma Islam Arab yang dibawa pengungsi Timur Tengah.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2016, October 3). *Hungary votes on EU refugee quotas referendum*. Retrieved from Al Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2016/10/hungary-votes-eu-refugee-quotas-referendum-161002042908625.html>
- BBC. (2016, March 4). *Migrant Crisis: Migration to Europe Explained in seven charts*. Retrieved from BBC: <http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>
- Bebel, J., & Collier, J. (2015). Euroscepticism's Many Faces: The Cases of Hungary and the UK. *Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union*, 8.
- Clayton, J. (2016, September 20). *Over 300.000 refugees and migrants cross Med so far in 2016*. Retrieved from UNHCR: <http://www.unhcr.org/news/latest/2016/9/57e12c564/300000-refugees-migrants-cross-med-far-2016.html>
- Clayton, J., & Holland, H. (2015, December 31). *Over one million sea arrivals reach Europe in 2015*. Retrieved from UNHCR: <http://www.unhcr.org/5683d0b56.html>
- Dunai, M. (2015, June 17). *Hungary to fence off border with Serbia to stop migrants*. Retrieved from Reuters: <http://www.reuters.com/article/us-hungary-immigration-idUSKBN0OX17I20150617>
- European Council. (2015, September 2015). *Council Decision (EU) 2015/1523*. Retrieved from Eur-Lex Access to European Union Law: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2015_239_R_0011
- Eurostat. (2016, December 14). *Asylum quarterly report*. Retrieved from Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report#Further_Eurostat_information
- Hopf, T. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. *International Security*, 171-200.
- Hungarian Government. (2013, October 1). *The New Fundamental Law of Hungary*. Retrieved from Website of The Hungarian Government: <http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%20Hungary.pdf>

- Hungary, M. o. (2004). *Gypsies/Roma In Hungary*. Budapest: Ministry of Foreign Affairs of Hungary.
- Index Mundi. (2016, October 8). *Hungary Demographics Profile 2016*. Retrieved from Index Mundi: http://www.indexmundi.com/hungary/demographics_profile.html
- Katzenstein, P. J. (1996). *The Culture of National Security*. New York: Columbia University Press.
- Klenner, Z., & Szép, Á. (2010). Refugees in Hungary at the beginning of the third millennium. *AARMS*, 261.
- Lyman, R. (2015, October 16). *Hungary Seals Border With Croatia in Migrant Crackdown*. Retrieved from The New York Times: <http://www.nytimes.com/2015/10/17/world/europe/hungary-croatia-refugees-migrants.html>
- Noack, R. (2015, September 3). *Muslims threaten Europe's Christian identity, Hungary's leader says*. Retrieved from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/03/muslims-threaten-europes-christian-identity-hungarys-leader-says/>
- Pollet, K., & Mouzourakis, M. (2015). *Crossing Boundaries: The new asylum procedure at the border and restriction to accessing protection in Hungary*. Brussels: ECRE (European Council on Refugees and Exiles).
- Prifti, A., & Hutcherson, K. (2016, October 5). *Hungary voters reject EU migrant-resettlement plan, but low turnout invalidates results*. Retrieved from CNN: <http://edition.cnn.com/2016/10/02/europe/hungary-migrant-referendum/>
- Reus-Smit, C. (2005). Constructivism. In S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Patterson, C. Reus-Smit, & J. True, *Theories of International Relations* (p. 196). New York: Palgrave Macmillan.
- Sik, E. (2016). *The Social Aspect of the 2015 Migration Crisis in Hungary*. Budapest: Társi Social Research Institute.
- The Telegraph. (2015, September 23). *Refugee crisis: EU divided as Hungary attacks migrant quota as 'unrealisable and nonsense'*. Retrieved from The Telegraph:

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/hungary/11884665/Refugee-crisis-EU-divided-as-Hungary-attacks-migrant-quota-as-unrealisable-and-nonsense.html>

Trócsányi, G. (1939). The Hungarian National Character. *The Hungarian Quarterly Volume 5*, 197.

Virostkova, L. (2015, June 24). *Hungary and allies reject EU migrant quotas*. Retrieved from Euobserver: <https://euobserver.com/beyond-brussels/129256>